



► ATURAN HUNIAN

Regulasi Hotel Virtual Mendesak

JOGJA—Pemkot didesak untuk segera menerbitkan regulasi khusus hotel virtual berbasis perusahaan luar negeri yang kian menjamur di Kota Jogja.

Ketua PHRI Jogja, Deddy Pranowo Eryono mengatakan operasional hotel virtual sudah setahun belakangan menjadi perbincangan nasional.

"Mereka ada yang tidak bayar pajak. Soal izin ada yang masih pondokan tapi fungsinya jadi hotel, itu kan salah," ujarnya, Senin (13/1).

Dengan tidak menyetor pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang, sementara yang dikejar Pemkot adalah PHRI.

Operasional hotel virtual, kata dia, juga tidak diawasi sebab tidak ada sertifikasi. Ini berdampak pada keamanan tamu yang tidak terjamin, dan imbasnya pada *image* Kota Jogja sebagai destinasi wisata.

Meskipun mungkin secara internasional atau nasional mereka telah memenuhi regulasi perizinan, tapi semestinya sejumlah persyaratan di level daerah juga perlu diperhatikan. Hal ini selain untuk menghindari kecemburuan antarpengusaha hotel, juga melindungi konsumen.

Dia juga menyayangkan adanya praktik *ajai* mumpung hotel virtual. Pada *low season* mereka bisa memasang harga Rp90.000, tapi pada *high season*, harga kamar bisa sampai Rp1,25 juta. "Parkir *nuthuk* saja ditegur, kok ini enggak?" ucapnya.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengatakan hotel virtual sejauh ini memang belum ada regulasinya. Menurut dia yang jadi patokan semestinya izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kalau belum diregulasi, nanti kita buat regulasinya. Kadang-kadang mereka juga tidak lapor. Seperti halnya penginapan lain, harus didaftarkan dan bayar pajak. Yang terpenting adalah proteksi pada konsumen," kata dia.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005